



POLA PENGELOLAAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI GILI LAWANG LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT

(Management Pattern of Ecotourism Based Community in Gili Lawang East Lombok District Nusa Tenggara Barat Province)

Muhammad Kholifathul Aziz, Markum, Kornelia Webliana B

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Jalan Pendidikan No.37 Mataram 83125

CP: Muhammad Kholifathul Aziz, email: muhammadkholif18@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to (1) analyze the pattern of ecotourism management in Gili Lawang based on the concept of CBT (Community based tourism) according to Demartoto (2009) and (2) analyze supporting and inhibiting factors that affect the involvement of community in managing ecotourism. The research was located in Gili Lawang ecotourism area, Sugian Village, Sambelia, East Lombok Regency. This research used descriptive qualitative method, by using literature reviews data collection method, interviews, and observations. The number of respondents involved were 14 respondents. Data analysis that was used is descriptive analysis. The result of this research showed that the management pattern of community based ecotourism in Gili Lawang has not fully implement CBT (Community based tourism) concept since the involved community has not been included in evaluator aspect. Supporting factors that affect the involvement of the community in managing ecotourism is the potential of tourism that can be developed into tourism attraction, the desire of the community to preserve the nature, and to grow the economy surrounding the tourism area. Meanwhile, the inhibiting factor that affect the involvement of the community in managing ecotourism is the lack of education of the community regarding the development of ecotourism area and the lack of awareness of the community regarding the importance of their involvement in developing tourism area. Besides that, another inhibiting factor is the lack of government's concern to make approach to the native community to show how important community based tourism is.

Keywords: *Ecotourism, management pattern, involvement factor*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sektor pariwisata hakekatnya merupakan interaksi antara proses sosial, ekonomi dan industri. Oleh

karena itu unsur-unsur yang terlibat di dalam proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Peran serta masyarakat diharapkan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses ini. Untuk itu

masyarakat ditempatkan pada posisi memiliki, mengelola, merencanakan, memutuskan tentang program yang melibatkan kesejahteraannya.

Oleh karena itu sangatlah tepat jika pengelolaan pariwisata dilakukan dengan model ekowisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara berbagai *stakeholders* pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Demartoto (2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa pola pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dimana masyarakat dalam pengelolaan suatu objek wisata sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola dan sebagai evaluator yang mana akan bersinergi dengan pemerintah dan juga pihak swasta yang hasilnya merupakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat pula.

Salah satu destinasi wisata di NTB yang cukup mendapatkan perhatian pada saat ini adalah Gili Lawang. Gili ini terletak 3 km di sebelah timur laut Pulau Lombok dan panjang maksimum 3,5 km dengan luas 506,20 ha. Secara administratif gili ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan wilayah pengelolaan BKPH Rinjani Timur. Gili Lawang mempunyai potensi wisata alam berupa pantai pasir putih, ekosistem terumbu karang dan mangrove. Sedangkan atraksi wisata dapat berupa renang, *snorkling*, *diving*, berjemur (*sun bathing*), dayung (*boating*), perahu layar (*sailing*) dan *camping*.

Pengelolaan kawasan di Gili Lawang sampai sejauh ini dikelola oleh kelompok sadar wisata Gili Sulang, salah

satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kawasan adalah dalam pengelolaan sarana prasarana transportasi untuk menuju Gili Lawang. Tingginya potensi keanekaragaman dan aktivitas wisata yang ada di Gili Lawang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Namun, permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada penyediaan transportasi dan perdagangan. Permasalahan lain yang terjadi adalah masih kurangnya kerjasama dengan investor dan instansi-instansi lain, masih kurangnya informasi tentang Gili Lawang kepada wisatawan sehingga masih kurang pengunjung.

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan kawasan Gili, perlu dilakukan kajian dalam rangka meninjau keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan wisata. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Gili Lawang yang bertujuan untuk menganalisis pola pengelolaan ekowisata di Gili Lawang berdasarkan konsep CBT (*Community based tourism*) menurut Demartoto (2009) dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gili Lawang Dusun Tekalok, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan

Oktober - Mei 2020. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang di dasari atas pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan (Siregar, 2017). Pertimbangan penentuan lokasi penelitian yaitu, memiliki potensi wisata yang sedang berkembang dan menjadi tujuan wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dan merupakan kawasan hutan dibawah pengelolaan BKPH Rinjani Timur.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden. Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, penentuan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Sampling* yaitu teknik memilih sampel dari kelompok-kelompok unit-unit yang kecil atau cluster (Nazir, 2009). Pengelompokan atau cluster ini di dasarkan pada ragam lapisan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Gili Lawang. Ragam lapisan masyarakat tersebut terbagi kedalam beberapa kelompok yaitu :

1. Pengurus kelompok sadar wisata Sulang
2. Anggota kelompok sadar wisata Sulang
3. Aparat desa (Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan)
4. Pengelola kawasan Gili Lawang (BKPH Rinjani Timur)
5. Masyarakat yang terlibat (Usaha produktif, pemuda dan nelayan)

Dari beberapa kelompok ragam lapisan masyarakat diatas teknis pengambilan responden yang digunakan adalah metode *snowball sampling*. Menurut Siregar (2017), *snowball*

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang pada mulanya jumlahnya kecil tetapi makin lama makin banyak, berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari seperti disajikan dalam Tabel 1.

Analisis Data

Analisis pola pengelolaan ekowisata di Gili Lawang dan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata dilakukan secara deskriptif, dimana analisa deskriptif merupakan suatu analisa dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Gili Lawang merupakan bagian dari kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Rinjani Timur, tepatnya pada Petak HL-75 dan HL-69 Blok Pemanfaatan Hutan Lindung dengan luas 506,20 ha. Secara administratif pemerintahan, Gili Lawang terletak di Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Hutan lindung Gili Lawang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri

Tabel 1. Variabel penelitian

Variabel	Komponen	Teknik pengumpulan data	Teknik analisis
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan kawasan - Tahapan penyusunan perencanaan - Lama perencanaan - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kawasan 	Wawancara	Deskriptif
Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber pembiayaan - Keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan - Jenis-jenis investasi - Besarnya nilai investasi 	Wawancara	Deskriptif
Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kelompok masyarakat - Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan - Jenis-jenis pelaksanaan 	Wawancara	Deskriptif
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan pihak lain - Sistem bagi hasil - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan - Jenis program pengelolaan 	Wawancara	Deskriptif
Pendapatan dan sumber pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya pendapatan - Sumber pendapatan - Keterlibatan masyarakat dalam pendapatan 	Wawancara	Deskriptif
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Materi yang di evaluasi - Waktu evaluasi - Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi 	Wawancara	Deskriptif

Kehutanan Nomor: 8213/Kpts/-II/2002. Hutan Lindung Gili Lawang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi (flora dan fauna) serta memiliki fenomena alam yang luar biasa termasuk keindahan pemandangan alamnya. Flora dan fauna yang terdapat di kawasan Gili Lawang bermacam-macam seperti ekosistem mangrove, ilalang, kalelawar, ular dan

aneka burung laut. Pemandangan laut yang mendukung di kawasan Gili Lawang juga adalah ekosistem terumbu karang yang berlokasi di Lendang Sunset dan Lendang Sunrise.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat idealnya harus melibatkan masyarakat dalam seluruh aspek kegiatan,

karena tujuan akhir dari konsep ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian meskipun pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat terfokus pada masyarakat sebagai pemeran utama, keterlibatan pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Menurut Demartoto (2009), masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan *community based tourism* berperan disemua pembangunan baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator.

Penelitian ini difokuskan pada kajian aspek pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sinkronisasi antar ke-5 aspek tersebut dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Selain itu kolaborasi antara berbagai pihak juga merupakan aspek penting yang harus diterapkan untuk mencapai kondisi optimum dalam ekowisata berbasis masyarakat.

Keterlibatan dalam Perencanaan

Dalam suatu organisasi atau sebuah pembangunan kawasan ekowisata sangat diperlukan suatu perencanaan untuk menjadi tolak ukur sebelum melakukan sebuah kegiatan. Pengelola BKPH Rinjani Timur sejauh ini sudah memiliki perencanaan terkait pengelolaan Gili Lawang. Perencanaan tersebut masuk di dalam dokumen perencanaan RPHJP periode 2014 - 2023 dan RPHJPD periode 2019. Waktu pelaksanaan perencanaan untuk RPHJP 10 tahun dan untuk RPHJPD 1 tahun. Isi dari dokumen perencanaan di BKPH Rinjani Timur terfokus pada jasa lingkungan. Penyusunan dokumen perencanaan terkait kawasan Gili Lawang belum melibatkan

masyarakat, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa sampai sejauh ini belum dilibatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan terkait kawasan Gili Lawang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa masyarakat setempat dan pemerintah Desa Sugian belum terlibat didalam aspek perencanaan terkait penyusunan dokumen perencanaan, kehadiran pada saat rapat perencanaan kawasan dan tidak memiliki dokumen perencanaan terkait kawasan Gili Lawang. Hal ini dikarenakan baru keluarnya izin kemitraan dari pihak pengelola yang menyebabkan pemerintah Desa Sugian belum membuat perencanaan. Namun Pokdarwis Gili Sulang telah memiliki konsep perencanaan dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat ini, seperti program pengelolaan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kontribusi masyarakat pada sumber pendapatan kelompok. Akan tetapi konsep ini belum di tuangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan, baru hanya usulan saja untuk membuat suatu perencanaan. Menurut responden dalam perencanaan harus melibatkan masyarakat setempat agar masyarakat menjadi sejahtera dan memiliki lapangan pekerjaan.

Kanesti (2008), mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Kolaborasi antara masyarakat sekitar dengan pihak pengelola BKPH Rinjani Timur sangat penting dilakukan untuk

mencapai tujuan bersama. Akan tetapi keterlibatan masyarakat setempat dalam tahapan penyusunan perencanaan dapat dikatakan masih kurang, karena belum melibatkan masyarakat sekitar kawasan secara keseluruhan, pengelola BKPH Rinjani Timur baru hanya melibatkan Pokdarwis Gili Sulang dalam penyusunan Desain Tapak Gili Lawang.

Sebagai Investor / Pembiayaan

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Gili Lawang ini berupa investasi jasa transportasi berupa sampan, dimana masyarakat menginvestasikan sampannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan memajukan suatu kawasan ekowisata. Kemudian sejauh ini ada hibah sarana prasarana seperti kamar mandi, musholla dan gazebo dari Kementrian Desa bekerjasama dengan Desa Sugian. Untuk pengelola sendiri dari BKPH Rinjani Timur baru mengusulkan anggaran dana untuk pengelolaan ekowisata Gili Lawang di tahun 2021. Menurut responden keterlibatan masyarakat pada aspek investor / pembiayaan sangat diperlukan untuk menambah penghasilan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam pengembangan sektor ekowisata tentunya tak bisa terlepas dari investasi. Dengan adanya kekayaan alam serta beragam budaya yang dimiliki dalam setiap lokasi wisata, diharapkan dapat menarik minat para investor untuk menginvestasikan modal mereka pada sektor pariwisata. Kemudian untuk kerjasama dengan pihak investor swasta sampai sejauh ini belum ada, di karenakan kegiatan pengembangan ekowisata baru berjalan satu tahun, sampai sejauh ini

pihak pengelola BKPH Rinjani Timur dan Pokdarwis Gili Sulang tetap mempromosikan kawasan ekowisata Gili Lawang kepada pihak – pihak terkait yang akan menjadi calon investor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola BKPH Rinjani Timur di dapatkan hasil jenis – jenis investasi yang dapat dilakukan oleh pihak investor seperti, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam suatu pemanfaatan jasa lingkungan investor dapat bekerjasama dengan pengelola dalam hal pemanfaatan air, wisata alam, jasa karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Menurut responden yang telah di wawancarai, pihak investor dapat membangun sarana prasarana pendukung untuk mendukung suatu pengembangan ekowisata dengan ketentuan tetap menjaga kelestarian alam, kemudian responden menjelaskan bahwa hal ini sudah tertera di dalam kebijakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung. Dalam Desain Tapak Gili Lawang ruang usaha diperuntukkan bagi usaha penyediaan sarana wisata alam yaitu: a) Penyediaan Wisata Tirta, b) Sarana Transportasi, c) Akomodasi, d) Wisata Petualangan, dan e) Olahraga Minat Khusus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Demartoto (2009) bahwa jenis usaha yang secara nyata dapat dilakukan oleh investor dan masyarakat setempat yaitu, penyedia layanan akomodasi, layanan transportasi dan layanan komunikasi.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan

Menurut Waskito (2006), keberhasilan dalam pengelolaan ekowisata tidak lepas dari kerjasama antara

Stakeholders (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat) dari level daerah sampai level nasional. Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pada saat ini masyarakat maupun pengelola sudah terlibat dalam aspek pengelolaan. Bahkan bila pengelolaan pariwisata yang dilakukan berjalan dengan sistem pengelolaan yang baik dan dengan melibatkan semua unsur masyarakat maka akan menjadikan sumber pendapatan yang dapat berlangsung terus menerus (Scheyvens, 1999).

Bentuk pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat yang dilakukan yaitu penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan, penambahan jumlah bak sampah dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung yang datang, kemudian bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh BKPH Rinjani Timur sampai sejauh ini masih berupa kelembagaan. Menurut responden yang telah diwawancarai menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan sangat penting, karena dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Kemudian terkait kerjasama dengan pihak lain responden menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada kerjasama dengan pihak lain. Namun setelah ada Desain Tapak yang telah disusun tahun 2018 lalu, dapat memberikan harapan kepada masyarakat dan pengelola agar para investor tertarik untuk bekerjasama dengan pengelola Gili Lawang. Untuk bagi hasil antara pengelola dengan masyarakat sudah tercantum di NKK (Nota Kesepakatan Kerja) dimana masyarakat mendapat 80% dan pengelola 20%. Dari 80% yang di dapat oleh masyarakat dari hasil kerjasama dengan pengelola BKPH Rinjani Timur

harapannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Lalu 20% untuk pengelola dapat digunakan untuk pemeliharaan kawasan Gili Lawang, pengadaan / pembuatan, perawatan dan pengoperasian infrastruktur.

Sebagai Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dilapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pengelola sudah terlibat dalam aspek pelaksanaan, keterlibatan masyarakat di dalam aspek pelaksanaan ini telah tertuang di dalam konsep perencanaan yang telah diusulkan oleh Pokdarwis Gili Sulang. Bentuk keterlibatan dari masyarakat yaitu berupa penyedia jasa transportasi berupa sampan untuk menyebrang menuju Gili Lawang, jasa penyewaan alat snorkeling, jasa pemandu wisata dan berdagang. Lalu masyarakat juga terlibat dalam organisasi kelompok dalam pengelolaan ekowisata Gili Lawang yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Gili Sulang yang berjumlah 21 orang dan sudah di kukuhkan oleh Kepala Desa Sugian. Kemudian bentuk keterlibatan dari pengelola atau BKPH Rinjani Timur yaitu berupa patroli kawasan untuk melakukan pengawasan di kawasan Gili Lawang, selain itu BKPH juga telah membuat desain tapak Gili Lawang dan telah menyediakan ruang usaha bagi investor maupun masyarakat setempat.

Menurut pemaparan dari responden terkait keterlibatan masyarakat terhadap aspek pelaksanaan sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, aspek pelaksanaan dapat juga menambah penghasilan ekonomi bagi

masyarakat setempat. Dalam hal ini masyarakat telah berkomitmen untuk terlibat langsung, dikarenakan masyarakat telah merasakan keuntungan yang di dapatkan dari suatu pengembangan ekowisata. Masyarakat juga berharap kepada pemerintah setempat agar diberikan fasilitas dalam melakukan pengembangan ekowisata. Bentuk keterlibatan masing-masing lembaga dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk keterlibatan dalam aspek pelaksana

No.	Lembaga	Bentuk Keterlibatan
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia jasa transportasi - Penyewaan alat snorkeling - Pemandu wisata - Pedagang - Terlibat dalam organisasi kelompok wisata
2	Desa Sugian	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk organisasi kelompok wisata - Penyedia sarana prasarana wisata
3	BKPH Rinjani Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli kawasan - Melakukan penataan blok kawasan - Menyediakan ruang usaha

Sumber : Data primer tahun 2020

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Dipertegas lagi bahwa evaluasi merupakan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan kriteria yang ditentukan (Crawford, 2000). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan dapat diketahui

bahwa pada saat ini pengevaluasian belum dilakukan oleh masyarakat setempat, dikarenakan belum ada perencanaan atau dokumen perencanaan yang akan di evaluasi oleh masyarakat setempat. Lalu untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Gili Sulang berupa program pelestarian lingkungan dan kontribusi masyarakat terhadap pendapatan kelompok juga tidak pernah dilakukan pengevaluasian oleh masyarakat dan Pokdarwis Gili Sulang. Masyarakat setempat juga tidak pernah memberikan saran, masukan, atau merumuskan instrument terkait tentang pengevaluasian.

Pihak pengelola BKPH Rinjani Timur sampai sejauh ini belum melakukan pengevaluasian, hal ini dikarenakan belum setahun bermitra dengan masyarakat, akan tetapi pihak pengelola BKPH Rinjani Timur akan tetap melaksanakan pengevaluasian. Untuk waktu pelaksanaan belum ditentukan karena belum satu tahun bermitra dengan masyarakat. Kemudian pada aspek pemantauan / evaluasi ini harapannya pihak pengelola dari BKPH Rinjani Timur melibatkan masyarakat setempat agar dapat mengetahui seluruh perencanaan yang belum berjalan dan dapat menciptakan pola baru. Dalam suatu organisasi sangatlah penting melakukan pemantauan/evaluasi agar dapat memper tanggung jawabkan suatu perencanaan demi keberlanjutan kawasan dan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dari aspek perencanaan.

Pendapatan Kelompok

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan responden didapatkan bahwa sumber pendapatan Pokdarwis Gili Sulang berasal dari kontribusi masyarakat, tamu yang berkunjung, jasa transportasi,

berdagang dan jasa penyewaan alat snorkeling. Besar pendapatan yang didapatkan sampai sejauh ini yang masuk pendataan kurang lebih satu juta pertahun, namun banyak juga wisatawan yang datang berkunjung tidak melalui pokdarwis sehingga pendapatan kelompok masih terbilang minim, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan pokdarwis Gili Sulang.

Bentuk keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan kelompok hanya dari jasa transportasi, karena dari hasil jasa transportasi saat membawa tamu akan dipotong sebesar 50 ribu dan akan langsung masuk ke uang kas pokdarwis Gili Sulang. Pemasukan 50 ribu dari jasa transportasi ini di tetapkan oleh Pokdarwis Gili Sulang sebagai kontribusi masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Jumlah perahu yang telah bekerjasama dengan Pokdarwis Gili Sulang sejauh ini 7 – 10 perahu. Masyarakat yang memiliki perahu juga telah menyetujui pemotongan sebesar 50 ribu yang akan masuk uang kas Pokdarwis, menurut masyarakat pemotongan itu sebagai tanda terimakasih karena telah diberikan pengunjung dan tentunya uang itu dapat digunakan untuk menambah uang operasional Pokdarwis Gili Sulang.

Mekanisme penyerahan uang ini langsung dilakukan setelah mengantar pengunjung dari kawasan Gili Lawang. Sampai sejauh ini Ketua Pokdarwis Gili Sulang tetap berusaha meyakinkan masyarakat setempat untuk bekerjasama dengan Pokdarwis, karena masih banyak pengunjung atau wisatawan yang berkunjung tidak melalui Pokdarwis melainkan melalui masyarakat biasa yang memiliki sampan, hal ini menyebabkan

pendapatan kelompok masih sangat minim. Rekapitulasi sumber pendapatan dan estimasi besaran pendapatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumber-sumber dan estimasi besaran pendapatan masyarakat dari ekowisata

Para Pihak	Sumber-sumber penghasilan	Estimasi Pendapatan (Rp/tahun)
Masyarakat	- Penyewaan alat snorkeling	Rp. 1.000.000
	- Pedagang	Rp. 2.500.000
	- Pemandu wisata	Rp. 1.000.000
Pokdarwis	- Jasa transportasi	Rp. 1.000.000

Sumber : Data primer tahun 2020

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Ekowisata

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemerintah dan pengelola sudah terlibat dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat bahkan pemerintah desa selalu mensupport kegiatan yang berkaitan dengan ekowisata Gili Lawang. Bentuk sumbangsih dari pemerintah Desa Sugian yang telah dilakukan salah satunya yaitu mengkoordinir masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan untuk diberi pemahaman terkait pentingnya menjaga kawasan ekowisata Gili Lawang agar tetap lestari. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas kelompok sampai sejauh ini dari pihak pemerintah Desa Sugian dan

pengelola BKPH Rinjani Timur belum pernah melaksanakan kegiatan. Lalu hubungan kordinasi antara pemerintah Desa Sugian dengan BKPH Rinjani Timur sampai sejauh ini berjalan dengan baik. Bentuk keterlibatan pemerintah Desa Sugian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Bentuk keterlibatan pemerintah Desa Sugian dalam pengelolaan ekowisata

Aspek	Bentuk Keterlibatan
Penyuluhan Masyarakat	- Mengkoordinir para nelayan untuk menjaga kelestarian alam kawasan Gili Lawang - Sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata
Pemberdayaan Masyarakat	-
Kontribusi Anggaran Desa	-

Sumber : Data primer tahun 2020

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan responden di dapatkan bahwa faktor pendukung keterlibatan masyarakat yaitu adanya potensi wisata yang dapat di kembangkan menjadi sebuah atraksi wisata seperti potensi bawah laut di kawasan Gili Lawang yang dapat di jadikan area snorkeling, diving dan fishing. Menurut Mellu (2018) apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata.

Lalu keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh keinginan masyarakat sendiri untuk menjaga alam agar tetap lestari. Selain itu faktor pendukung keterlibatan masyarakat lainnya yaitu dapat menambah perekonomian masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat sekitar kawasan yang berpendapatan rendah. Kemudian masyarakat dapat berpikir kreatif bahwa kawasan ekowisata Gili Lawang ini menjanjikan apabila dikelola dengan sistem yang baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Faktor pendukung lainnya yang dapat menambah keterlibatan masyarakat yaitu tersedianya sarana prasarana penunjang ekowisata dan terjalannya kordinasi yang baik antara pemerintah Desa Sugian dan pengelola BKPH Rinjani Timur. Hasil identifikasi faktor pendukung keterlibatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Faktor-faktor pendukung pengembangan ekowisata

Aspek	Faktor Pendukung
Kondisi Biofisik	Memiliki potensi wisata yang sangat baik untuk di kembangkan
Partisipasi Masyarakat	a. Menambah perekonomian masyarakat b. Keinginan melestarikan alam
Kelembagaan	Penyedia sarana prasana kawasan ekowisata Gili Lawang
Kerjasama para pihak	Kordinasi yang baik antar Desa dan BKPH Rinjani Timur

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa faktor penghambat keterlibatan masyarakat yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengembangan suatu daerah ekowisata, sebagian besar dari masyarakat tidak memahami betul mengenai ekowisata. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk memajukan suatu kawasan wisata. Selain itu faktor penghambat lainnya di karenakan kurangnya kepedulian pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat terkait pentingnya ekowisata berbasis masyarakat dan belum adanya investor dari pihak swasta yang bekerja

Tabel 6. Faktor-faktor penghambat pengembangan ekowisata Gili Lawang

Aspek	Faktor Penghambat
Kondisi SDM	a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ekowisata b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi
Dukungan Pemerintah	Kurangnya pendekatan kepada masyarakat dan sosialisasi terkait pentingnya keterlibatan masyarakat
Kerjasama para pihak	Belum ada kerjasama antar pihak swasta karena kurangnya promosi

Sumber : Data primer tahun 2020

sama dengan pengelola menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Hasil

identifikasi faktor penghambat keterlibatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Suranti (2005), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan yang jelas dan rinci mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan daerah tujuan wisata, yang ada hanyalah berupa himbauan agar masyarakat diikutsertakan dalam upaya pengembangan tersebut.

KESIMPULAN

1. Pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Gili Lawang belum sepenuhnya menerapkan konsep CBT (*Community based tourism*). Masyarakat masih belum terlibat dalam aspek evaluator.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata yaitu adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata, keinginan masyarakat sendiri untuk menjaga alam agar tetap lestari, dan dapat menambah perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengembangan suatu daerah ekowisata dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk memajukan suatu kawasan wisata. Selain itu faktor penghambat lainnya karena kurangnya kepedulian pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat terkait

pentingnya ekowisata berbasis masyarakat.

Suranti, R. (2005), *Pariwisata Budaya dan Peran serta Masyarakat*, Workshop Wisata Budaya Bagi Kelompok Masyarakat Propinsi DKI Jakarta, 12 Juli 2005.

Waskito, B. 2006. *Pengembangan Wisata Pedesaan Untuk Memberdayakan Potensi Masyarakat Desa di Kabupaten Karanganyar*. LPPM. UNS Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Crawford, J. 2000. *Ed. 2. Evaluation of Libraries and Information Services*. London.

Demartoto, A. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Kanesti, N. 2008. *Pengembangan Pariwisata Alam Prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Utara*. [Skripsi, unpublished]. IPB. Bogor.

Mellu., Marlin, Bessie., Juita L & Bunga., Tobias., Tokan. 2018. *Analisis faktor Penunjang dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata pada Obyek Wisata Alam Bola Palelo, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Journal Of Management. Vol. 7, No.2.

Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Scheyvens, R. 1999. *Ecotourism and The Empowerment of Local Communities*. *Tourism Management*, 20(1999):245-249.

Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabet. Bandung.